

## WACANA KESETARAAN GENDER: KAJIAN KONSEPTUAL PEREMPUAN DAN PELAKU MEDIA MASSA

Benni Handayani<sup>1)</sup>, Yudi Daherman<sup>2)</sup>

- 1) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau; bennihandayani@comm.uir.ac.id
- 2) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau; yudidaherman@comm.uir.ac.id

### ABSTRAK

Fenomena feminisme merupakan fenomena yang sudah lama beredar di masyarakat luas terutama di media massa, padahal sebenarnya media tersebut memiliki idealisme yaitu memberikan informasi yang benar. Hal ini menuntut media untuk berperan sebagai sarana pendidikan agar pembaca dan pendengar memiliki sikap kritis, kemandirian, dan pemikiran yang mendalam. Temuannya akan disajikan dalam artikel ini. Konstruksi media akan menentukan persepsi khalayak. Namun pada kenyataannya, dinamisme komersial merupakan kekuatan dominan dalam menentukan pesan dan konten di media. Logika pasar seperti ini cenderung mengarahkan penyelenggaraan sistem informasi di media, termasuk kajian gender. Walaupun definisi gender masih menjadi perdebatan yang semakin dinamis, secara global dan etimologis, gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Ketidakadilan yang dialami perempuan dalam konteks pemberitaan media pada akhirnya menjadi senjata bagi feminis liberal untuk terus mendapat dukungan pemikiran perempuan akibat citra visual perempuan di media yang seringkali terkesan tidak adil. Media selalu menjadikan perempuan sebagai komoditas berbasis permintaan pasar. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat yang sangat tertanam dalam budaya patriarki. Kajian ini merupakan kajian konseptual yang lebih menitikberatkan pada kajian pustaka dalam kerangka kesetaraan gender dan media massa.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Perempuan, Media Massa.

### ABSTRACT

*The phenomenon of feminism is a phenomenon that has been circulating for a long time in the wider community, especially in the mass media, even though the media actually have an idealism, namely to provide correct information. This requires the media to act as a means of education so that readers and listeners have a critical attitude, independence, and depth of thinking. The findings will be presented in this article. The construction of the media will determine the audience's perception. However, in reality, commercial dynamism is the dominant force in determining messages and content in the media. Market logic like this tends to direct the organization of information systems in the media, including gender studies. Although the definition of gender is still an increasingly dynamic debate, globally and etymologically, gender is defined as a trait inherent in both men and women that is socially and culturally constructed. The injustice experienced by women in the context of media coverage ultimately becomes a weapon for liberal feminists to continue to receive the support of women's thoughts due to the visual image of women in the media which often seems unfair. The media has always made women a commodity-based on market demand. The market in question is a society that is deeply embedded in a patriarchal culture. This study is a conceptual study with more focus on literature review in the framework of gender equality and mass media.*

**Keyword:** Gender fluid, woman, mass media

## 1. PENDAHULUAN

Kajian gender tidak hanya menjadi sebuah isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan, namun juga selalu menjadi isu aktual di sepanjang massa. Dalam tataran wacana, gender berkembang dengan sangat dinamis bahkan di Indonesia sekalipun yang notabene mewarisi budaya patriarki. Konsep dan wacana seputar gender mulai merambat di Indonesia pada era 80-an dan mulai masuk dalam ranah keagamaan pada era 90-an (Shofan, 2006)

Emansipasi wanita gencar disuarakan agar tidak terjadinya kesenjangan atau konflik yang berkepanjangan dari gender sendiri, sebab diskriminasi karena gender masih terjadi di beberapa tempat, masih ada orang yang menganggap bahwa laki-laki memegang atas segalanya. Hingga tahun 2005 studi perempuan di Indonesia masih menggunakan kata “diskriminasi” sebagai wacana utamanya. Istilah “diskriminasi wanita” atau “diskriminasi gender” mendominasi tulisan para feminis Indonesia. Tapi sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “kekerasan terhadap perempuan” secara perlahan menggusur istilah “diskriminasi gender” atau “diskriminasi terhadap perempuan” dari wacana studi perempuan dan praktik hukum di Indonesia. (Danardono Dkk, 2014)

Untuk membahas mengenai gender memang selalu terjebak pada definisi. Seperti para feminis yang selalu membangun isu gender dengan membedakan definisi antara gender dan seks (Umar, 2001). Seks hanya mengacu kepada jenis kelamin, sedangkan gender lebih kepada kelompok atribut dan perilaku yang terbentuk dibentuk oleh kultur baik pada laki laki (maskulin) maupun perempuan (Feminim) (Humm, 2007). Dari 2 pandangan tersebut lahir beberapa konsep baru yang ditulis beberapa peneliti muncul lah istilah “Feminists are made, not born” selain itu muncul juga asumsi bahwa diskriminasi gender itu tersosialisasi dari orang tua dan lingkungan (Hooks, 2000).

Beberapa konsep lain diantaranya konsep nature dan nurture juga bisa menjadi referensi yang cukup argumentatif dalam mendefinisikan asal usul gender. Nature diasosiasikan sebagai karakter yang dibawa pada diri seseorang atau sifat alamiah manusia, sedangkan nurture terakumulasi dari lingkungan yang menyebabkan terbentuknya ciri-ciri dan kebiasaan yang terlihat (Webster 2003).

Banyaknya spekulasi atas berbagai definisi mengenai gender atau kesetaraan gender, menariknya semua menjurus pada satu tujuan yaitu mendekonstruksi norma dan tatanan yang telah terbentuk. Pada akhirnya muncul anggapan bahwa ‘kesetaraan’ dalam konsep gender sama dengan ‘keadilan’. Logika seperti ini yang selalu menjadi fokus para kaum feminis liberal dan sosialis. Jadi bila mengacu fenomena lebih global lagi kesetaraan gender merupakan isu internasional dalam rangka mendistorsi kemapanan konsep hak-hak seseorang yang sebelumnya telah diatur dalam ranah teologi (agama).

Gerakan feminisme liberal cukup masif di Indonesia bahkan kerap menggaungkan permasalahan perempuan di Indonesia sebagai cita-cita bersama untuk meraih dukungan mayoritas kaum wanita, menurut Yayasan Jurnal Perempuan (1999) persoalan perempuan atau yang juga dikenal dengan istilah diskriminasi perempuan yaitu mencakup delapan persoalan, 1; Sedikitnya jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. 2; Kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan. 3; Masih rendahnya upah pekerja perempuan dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki. 4; Terjadinya pelecehan seksual pada perempuan dalam lingkungan pekerjaan. 5; Media massa sering menjadikan perempuan sebagai objek seksual. 6; Tidak adanya payung hukum terhadap pembantu rumah tangga. 7; Sering terjadi eksploitasi terhadap perempuan untuk menjadi TKW di luar negara. 8; Hak cuti khusus bagi pekerja perempuan masih belum terpenuhi (Djoeffan, 2001). Dengan hadirnya struktur beserta kultur pro kekerasan di lingkungan masyarakat, membuat perempuan cenderung dijadikan sebagai objek kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Pada akhirnya perempuan sendiri merasa kekerasan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari.

Munculnya gerakan perempuan di Indonesia tentu tidak terlepas dari peran media massa selaku pemberi informasi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional yang diberitakan melalui media massa telah sukses memobilisasi kaum perempuan untuk bersatu dan bergerak menyampaikan kepentingan mereka. Di sini terlihat bahwa media massa telah memberikan sebuah gagasan baru bagi para aktivis perempuan dari berbagai penjuru dunia untuk bersatu membangun kekuatan serta menyuarakan isu serta kepentingan perempuan. Menurut Gamson & Meyer (2004) fenomena seperti ini bisa disebut sebagai master frame, yaitu peristiwa di suatu tempat yang kemudian mampu untuk mengilhami para aktivis lain untuk melakukan aksi serupa.

Gerakan perempuan semakin mengglobal dengan diselenggarakannya beberapa konferensi Internasional bertemakan perempuan. Pertemuan itu jelas menjadi ajang dan agenda penting bagi pejuang kaum perempuan untuk berbagi informasi, membangun relasi dan jaringan secara global. Puncaknya pada konferensi di Beijing tahun 1995 menjadi pertemuan terbesar dan bersejarah bagi kaum femins. Berikut peneliti merangkum beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh perempuan sedunia:

**Table 1.**  
**Daftar Konferensi Sedunia yang Diadakan oleh Perempuan**

<b>Tahun</b>	<b>Nama konferensi</b>
1946	The Commission on the Status of Women
1975	Mexico Women's Conference
1975	International Women's Year
1976-1985	UN Decade for Women

1979	Un Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
1980	Copenhagen Women Conference
1985	Nairobi Women Conference
1993	Vienna Human Rights Conference
1994	Cairo International Conference on Population and Development
1995	Beijing Women's Conference
2000	Beijing+5, New York
2002	Durban World Conference Against Racism
2005	UN Women's Conference

Sumber: Witarti, 2011.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi mendorong media massa untuk mengambil peran yang besar dalam penyebaran gerakan perempuan di seluruh penjuru dunia (Tarrow, 1994). Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya kemunculan serta penyebaran gerakan perempuan di berbagai Negara termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari partisipasi jumlah Non Governmental Organization (NGO) perempuan yang meningkat dengan pesat semenjak diadakannya konferensi perempuan internasional I di Mexico city tahun 1975, Konferensi perempuan II di Belanda tahun 1980, Konferensi perempuan III di Nairobi tahun 1985, hingga konferensi perempuan IV di Beijing tahun 1995.

Selain itu di Indonesia penyebaran ideologi feminisme juga terlihat dengan munculnya berbagai situs organisasi yang berperspektif feminis menyuguhkan bahasan isu-isu perempuan dari sudut pandang feminis. Dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa organisasi berspektif feminis yang berada di Indonesia (dalam Dewi, 2009) yaitu:

1. Institut Perempuan ; (<http://www.institutperempuan.or.id>),
2. Women Research Institute ; (<http://wri.or.id>),
3. Interseksi Foundation ; (<http://www.interseksi.org>),
4. Dewa-ap ; (<http://www.dewa-api.com>),
5. Rahima (Pusat Pendidikan, Info Islam dan Hak-hak Perempuan); (<http://www.rahima.or.id>),
6. Jaringan Islam Liberal (JIL); (<http://Islamlib.com>),
7. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK); (<http://www.asppuk.or.id>),
8. Komunitas Perempuan INDIPT Kembumen; (<http://perempuan.indipt.org>).

Selain menggunakan televisi dan internet dalam rangka penyebaran ideologi feminis di Indonesia, Media siaran radio juga dipilih oleh para aktivis atau penggiat seperti yang dilakukan oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta untuk

mengkampanyekan hak-hak perempuan Indonesia, Yasanti menggunakan media radio untuk melakukan percakapan interaktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan pendidikan politik untuk para buruh perempuan.

Dalam laporan Yayasan Anissa Swasti (2000), topik yang pernah diangkat yaitu mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan untuk berkisah ke dalam dunia politik. Selain itu, juga pernah mengangkat topik mengenai perempuan serta hukum di Indonesia yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan. Narasumber yang dihadirkan untuk membahas topik diskusi merupakan para aktivis perempuan dan pakar hukum.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana ideologi feminis liberal secara langsung maupun tidak langsung muncul dan menyebar di masyarakat melalui media massa. Fenomena itu tentu lahir dari proses redaksi berita, oleh karenanya perlu ada kajian lebih dalam bagaimana sebaiknya pers melakukan perlawanan dan tidak menjadi corong bagi penyokong isu kesetaraan gender yang semu.

## **2. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pathak Dkk (2013) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi masyarakat. Sedangkan menurut Moleog (2007) metode kualitatif sebagai prosedur inkuiri untuk menghasilkan data deskriptif berdasarkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistik. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka yang datanya diperoleh dari data sekunder berupa buku, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

### **Menangkal Gerakan Feminisme**

Merujuk pada Encyclopedia of Feminism, karangan Lisa Tuttle (1986), feminisme berarti feminis dalam bahasa Inggrisnya, kata tersebut berasal dari bahasa Latin femina (woman), secara harfiah artinya "having the qualities of females". Istilah ini pada mulanya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan diksi womanism pada tahun 1980-an. Alice Rossi menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu pada buku karangannya ditahun 1989 (Valentina, 2004). Meskipun pada beberapa penelitian menjelaskan bahwa pergerakan awal feminisme lahir dari Eropa, namun perkembangan yang cukup signifikan terhadap gerakan feminis adalah ketika mulai merambah di Amerika Serikat, bahkan hal ini diklasifikasikan dalam beberapa fase.

## **1. Gerakan Feminisme Fase Pertama**

Fase pertama bertepatan dengan lahirnya buku karya Mary Wollstonecraft berjudul “Vindication of the Right of Women” terbit pada tahun 1792. Pada fase awal ini kaum feminis bertumpuk pada perjuangan hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara, motor penggerakannya adalah gerakan feminisme liberalis. Pencapaian tertinggi mereka adalah pada tahun 1920 memperoleh hak pilih dalam pemilu (Suwastini, 2013).

## **2. Gerakan Feminsme Fase Kedua**

Gelombang kedua feminisme justru didominasi oleh feminis Perancis salah satunya bernama Helene Cixous. Fase kedua ini juga ditandai dengan terbitnya buku karangan Simone de Beavoir’s berjudul “The Second Sex” buku ini berisi bahwa perbedaan gender bukan berasal dari biologi, tapi memang sengaja dibuat untuk memperkuat penindasan terhadap kaum perempuan. Feminisme pada fase kedua juga memiliki agenda besar yaitu “women’s liberation” gerakan ini pada masa itu dianggap sangat revolusioner. Hal ini lahir atas ketidakpuasan kaum perempuan dalam bidang selain perjuangan di fase pertama, seperti contoh mengenai reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, serta masalah domesetisitas (Gillis, et al., 2004)

## **3. Gerakan Feminisme Fase Ketiga**

Pada fase ini kaum feminis menuntut keragaman pada perempuan (women’s diversity) terutama mengenai kepentingan perempuan kulit berwarna, yang semula kurang terwakili karena didominasi oleh ras kulit putih dan berasal dari kelas menengah (Kania, 2010).

Fase ketiga juga muncul sebagai bentuk kritik terhadap universalisme dalam fase kedua. Akibatnya pada tahun 1980 akhir terjadi reartikulasi konsep dan pandangan feminisme, internal dari gerakan tersebut masih mengakar sifat rasis dan etnosentris sebab hanya mengakomodasi kulit putih saja. Kedua feminis pada fase kedua belum mampu untuk total menyuarakan “sexual difference”. Pada saat yang sama dunia sedang disibukkan dengan hadirnya teori-teori poststrukturalisme, post kolonialisme yang kemudian feminisme berusaha berbaur hingga muncullah istilah postfeminisme. Garis besar postfeminisme adalah “pro terhadap perempuan namun tidak anti terhadap laki-laki” (Faludi, 2009).

Gerakan feminisme yang semulanya diserap dari Barat, pada awalnya menjadi sebuah angin segar bagi kaum perempuan, namun ibarat sebuah fatamorgana, gerakan feminisme bukan memberikan berbagai solusi justru mendistorsi kebudayaan timur di Indonesia, karena dipaksa untuk sesuai dengan konsep liberalisme barat, sebagai akibatnya muncullah berbagai pro dan kontra (Mutmainnah, 2018).

Dalam sejarah perjalanan gerakan feminisme, pada fase awal perjuangan adalah untuk mendapatkan hak asasi, namun difase selanjutnya mengarah kepada tujuan yang lebih radikal, seperti salah satu aktivis bernama Firestone yang berusaha meniadakan perbedaan jenis kelamin dan menghindari permikahan beda jenis kelamin, serta mengusung teknologi reproduksi buatan, seperti bayi tabung dan inseminasi buatan dari donor, serta yang paling radikal adalah memerintahkan para penganut feminisme untuk menolak segala institusi yang menganut sistem patriarki (Gunawan, 2016).

Fenomena liberalisasi secara global melahirkan berbagai macam dominasi, diantaranya adalah dominasi dari gerakan feminisme. Untuk mengelaborasi permasalahan ini maka perlu ada upaya pendekatan terlebih dahulu dalam mengurai bermacam macam fenomena feminisme, sebab begitu banyak bentuk dan jenis cara pandang feminis dengan menggunakan paradigma feminisme. Menurut Carol P. Christ & Plaskow Judith (1979) dalam (Muqoyyidin, 2013) terdapat sejumlah aliran besar feminisme, yaitu;

#### **4. Feminisme liberal**

Menekankan pada hak hak perempuan dan berusaha menghapus dalih bahwa perempuan secara biologis berbeda dari laki-laki, para agen feminis liberal berupaya sekuat mungkin agar perempuan bisa masuk dalam ranah publik yang tadinya merupakan kekuasaan kaum laki-laki, perempuan dianggap makhluk yang sangat emosional dan tidak mampu mengurus diri sendiri. Dampak yang ditimbulkan adalah ketakutan perempuan dengan pernikahan karena dianggap akan dibelenggu oleh ikatan dan paham konvensional mengenai tugas dan tanggung jawab istri. Fenomena ini mulai menyebar di Barat bahwa pernikahan dianggap tidak begitu penting dan sakral.

Marry Ann Mason seorang tokoh feminis AS yang sangat mendambakan kesetaraan gender, namun faktanya bahwa membludaknya wanita mendeirta karena konsep kesetaraan gender itu sendiri, banyak wanita terjat dalam konflik antara peran keibuan dan dan karir. Pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa tidak bisa antara wanita dan pria menempatkan persamaan perlakuan. Kesetaraan gender adalah hal yang mustahil tercipta (Ratna, 2001).

Dalam beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa banyak dari wanita yang bekarir dan telah membina rumah tangga/mempunyai multi peran, yang disebut sebagai peran ganda, dimana seorang wanita harus memainkan dua atau lebih peran yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja dalam waktu yang bersamaan. Fenomena peran ganda seperti ini sering mendatangkan konflik, dimana mereka harus pandai menyesuaikan diri baik dalam kehidupan pekerjaan maupun rumah tangga (Agustina Dkk, 2020)

## 5. **Feminisme kultural**

Feminisme kultural lebih kepada memperjuangkan nilai-nilai tradisional perempuan, seperti perasaan, pengasuhan, lingkungan kehidupan, dan nilai-nilai moral. Feminisme kultural menentang dominasi maskulin dengan berupaya menaikkan nilai-nilai feminim pada perempuan agar lebih dihargai secara universal, sehingga kesetaraan akan tercapai bila karakteristik dan nilai-nilai unik pada perempuan tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat secara umum (Jacobs & Nash, 2003).

## 6. **Feminisme radikal**

Gerakan ini gencar terhadap penghapusan secara total dominasi laki-laki terhadap perempuan. Konsep utama gerakan feminisme radikal adalah “consciousness-raising” merupakan peningkatan kesadaran dengan paham “the personal is political”. Di Indonesia feminis radikal berusaha menggugat konsep patriarki sebab akan sangat berkaitan dengan permasalahan biologis perempuan, sebab sistem yang dikenal dengan istilah patriarki dianggap sebagai sebuah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan (Jackson & Sorensen, 2005).

Feminisme radikal selalu menjurus kepada eksploitasi perempuan, seperti pelacuran, kerja, pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan juga transplantasi organ tubuh kaum perempuan (Fakih, 2001). Sedangkan menurut Tong (1998) feminisme radikal mencakup pada seksualitas, lesbianisme, dan reproduksi serta kekuasaan laki-laki atas perempuan, utamanya adalah penindasan tubuh perempuan yang sering dijadikan objek oleh laki-laki, fenomena ini kerap hadir dalam peliputan media massa.

Pada intinya agenda kerja utama gerakan feminis radikal adalah mengutuk patriarki, menolak sistem perkawinan, menghalalkan praktik aborsi, mendukung penuh orientasi lesbian serta revolusi sex. Bagi mereka menjadi seorang istri sama saja dengan penyanderaan. Hidup dengan memiliki suami sama seperti living with the enemy (Faizain, 2007).

## 7. **Feminisme sosialis**

Feminisme sosialis lebih kepada perjuangan keadilan ekonomi secara global. Seperti tidak menerima gagasan biologis, gagasan perbedaan jenis kelamin yang memicu ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan karena perbedaan kelas dalam hubungan produksi (Izziyana, 2017).

Menurut kaum feminis sosialis, salah satu kondisi yang menciptakan dan mempertahankan keberlangsungan adalah tubuh manusia, jenis kelamin, keterlibatan dalam mencari nafkah, mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan tugas-tugas rumahan lainnya tanpa bayaran. Hal ini memproduksi ilmu pengetahuan. Hal itu pula yang memproduksi dan menghadirkan eksploitasi sebagai basis dari apa yang disebut



teori dominasi. Kemudian hal kedua yaitu subjektifitas manusia tercipta dari struktur sosial yang bertautan dengan struktur produksi barang dan perekonomian. Ketiga analisis terhadap ketimpangan sosial yang melibatkan banyak faktor. Seperti ekonomi publik, pemerintahan, ideologi dan proses reproduksi manusia, serta aktifitas dalam berumah tangga termasuk di dalamnya seksualitas (Aminah, 2012).

Masuknya paham feminisme harus disikapi dengan kritis, karena secara historis tidak membuat wanita menjadi lebih baik. Selain karena bermasalah dalam konsepnya juga karena akibat negatif yang ditimbulkannya. Kehati-hatian juga sangat dibutuhkan, karena seringkali para pegiat gender menunjukkan fakta tentang ketertinggalan perempuan serta penindasan atasnya, namun dengan penyebab dan alasan yang telah diselewengkan (Khuza'i, 2012),

### **Kritik Terhadap Pelaku Media Massa Dan Pengarusutamaan Gender**

Dalam industri media, distribusi informasi dan produksi selalu menjadi tema yang tidak pernah habis. Sebab media dan pekerja media tidak mampu terlepas dari belenggu kapitalisme industri. Peran sebuah media sering menyiratkan hegemoni dari sebuah sistem yang patriarki di Indonesia. Dalam penelitian Nugroho (2018). Menyimpulkan adanya relasi kuasa antara media dan isu gender di Indonesia, terutama dalam dunia pertelevisian. Simpulan dari penelitiannya menjelaskan salah satu stasiun TV swasta di Indonesia yang berorientasi sebagai lembaga profit tidak akan pernah beranjak dari hitung-hitungan laba dan rugi.

Hal yang sama terjadi dikalangan pers sendiri, penelitian oleh Hendariningrum (2005) menyimpulkan bahwa pada kenyataannya publikasi media massa masih kental dengan bingkai budaya yang mendiskriminasi perempuan, akhirnya berita yang disiarkan di media massa menjadi bias gender. Padahal dalam posisi media, wartawan memegang peran penting dalam mencari berita tanpa harus melihat pertimbangan 'komoditas' Dari kepentingan ekonomi ini maka sangat wajar bila media menjadi salah satu alat bagi wacana feminisme untuk tetap eksis di Indonesia

Dalam konteks komunikasi massa, biasanya feminisme menggunakan teknik-teknik peropaganda dalam rangka menyebarluaskan konsep dan ideologi mereka, umumnya melalui pemerintahan, organisasi, atau lembaga-lembaga masyarakat. Ideologi tersebut dikemas secara halus maupun secara mengakar dengan hanya memanfaatkan kekuatan dari media massa serta industri hiburan dan pada akhirnya dengan cukup masif mampu mengubah lifestyle setiap orang yang tidak mempunyai usaha perlawanan terhadap pengaruh tersebut (Umar, 2005).

Arah pengarusutamaan gender dalam banyak kasus adalah mengenai marjinalisasi perempuan, seperti artikel yang ditulis oleh Santoso (2014) berpendapat bahwa terlihat banyaknya marjinalisasi yang dialami perempuan terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Di dalam

artikelnya juga meyakini bahwa pendekatan gender akan memperkecil kesenjangan tersebut.

Media massa adalah salah satu corong dalam memperlihatkan kesenjangan tersebut. Dalam pemberitaan kasus-kasus tertentu terutama yang memuat perempuan sebagai objeknya, citra perempuan sering menjadi komoditas untuk menarik pembaca, kritik gender sering diarahkan pada teks dan genre jurnalistik, termasuk komentar tentang citra perempuan yang tidak lengkap di media dan kerap mendefinisikan teks sebagai teks maskulin (Rouho & Torkkola, 2018).

Efek media yang semakin masif menciptakan sosok perempuan yang ditampilkannya adalah cara yang memperkokoh stereotip yang sudah terbangun di tengah masyarakat. Jadi pada umumnya media massa adalah salah satu yang melahirkan ketidaksetaraan gender dalam setiap pemberitaannya, tetapi ikut serta memperkokoh, serta melestarikan, bahkan memperparah ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat (Juditha, 2015).

Tidak sedikit kritik terhadap pers muncul dalam kajian akademis, diskriminasi dan marjinalisasi terhadap perempuan yang terekspos dalam media massa tentunya menjadi sasaran bagi kaum feminis liberal. Oleh karenanya pelaku media massa terutama jurnalis harus paham betul konten yang akan di terbitkan tanpa ada celah dan menjadi amunisi kaum feminis liberal dalam melestarikan praktik dan nyanyian kesetaraan gender, seperti gerakan feminis salah satunya.

Merujuk dari salah satu artikel yang ditulis oleh Bakhtiar (2019) bahwa hampir semua penentu kebijakan mengaku belum pernah menerima pelatihan seputar gender kecuali pemimpin redaksi. Jurnalis harus membekali diri dengan wawasan global yang tidak hanya semata mengenai isu internasional yang sedang aktual, namun juga harus paham betul berbagai macam gerakan-gerakan masif terstruktur yang akan merusak sendi-sendi kehidupan dan idealisme bangsa Indonesia.

### **Memahami Hak-Hak Wanita Dengan Kembali Kepada Rujukan Teologis**

Berdasarkan data BPS (2018) populasi warga Indonesia yang berjenis kelamin perempuan mencapai 49,76 %. Persentase itu menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk di Indonesia adalah perempuan. Perempuan merupakan sumber utama dalam menghasilkan generasi muda. Wajar bila keberlangsungan sebuah negeri tergantung pada sejauhmana didikan generasi muda oleh ibunya (Al-Banna 2003). Agama, termasuk Islam tentunya tidak pernah mengabaikan kedudukan serta peran seorang wanita, wanita selalu dipandang mulia. Oleh karenanya ia harus mendapat perlindungan lebih dari pria. Agama Islam misalnya, merupakan agama yang membawa petunjuk dan cahaya kepada manusia. seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam pedoman yang dimiliki masing-masing agama termasuk Islam. dengan meletakkan dasar dan

sistem hidup yang lengkap dan sempurna. Wanita dalam islam tidak pernah dibiarkan untuk mencari nilai dan harga diri sendirian (Salleh, 2016).

Tulisan mengenai upaya mengkambing hitamkan agama sebagai salah satu faktor yang melanggengkan penindasan terhadap perempuan begitu banyak, salah satunya menurut Mernissi & Hasan (1996) dalam tulisannya: Riffat Hassan dan Mernissi telah menyatakan dengan jelas bahwa landasan misoginis yang bersifat patriarkis dalam budaya Islam harus di bongkar apabila ingin mewujudkan keadilan gender. Upaya pembongkaran tersebut merupakan tantangan terbesar dari perjuangan gerakan Feminisme Islam. Para feminis harus berhadapan dengan tidak hanya doktrin agama yang bias gender, akan tetapi lembaga agama yang menjadi aparatur hegemoni patriarki sekaligus budaya agama yang banyak merugikan perempuan sebab dinilai pro kekerasan terhadap perempuan. Hal-hal tersebut yang berupaya dilawan oleh para feminis muslim dalam gerakannya

Dalam tulisannya pula Rifat Hasan dan Mernissi beranggapan bahwa doktrin agama lah yang membuat bias gender, sebab seluruh teks keagamaan merupakan hasil interpretasi ulama-ulama klasik, maksudnya adalah tafsir -tafsir Al-Qur'an dan Hadist yang lahir banyak merugikan kaum hawa. Banyak lagi tulisan tulisan penyelewengan dan pendeskreditan agama dalam kerangka feminisme. Padahal untuk menuntut keadilan terhadap wanita bagi kita seorang yang manganut budaya timur, cukup dengan kembali kepada konsep illahiah yang terdapat dalam kitab dan ajaran teologi. Seperti Islam misalnya, begitu banyak rujukan dan cara menyikapi soal konsep "berbeda tapi setara" itu. Meskipun sebenarnya sudah banyak pula tulisan-tulisan yang menjadi produk dari feminisme Islam, dimana ada beberapa tokoh pemikir yang memiliki kemampuaan akademis yang terbilang bagus namun menyelewengkan khasanah literatur Islam tentang perempuan menjadi sebuah komodifikasi dalam memandang konsep gender.

Menurut pandangan teologis, subordinasi tidak berarti inferioritas. Tuhan menempatkan perempuan di dalam subordinasi terhadap laki-laki tanpa mengurangi nilai dan kemuliaannya. Perempuan tidak perlu menolak kepemimpinan laki-laki karena perempuan tetap ciptaan Tuhan yang setara dengan laki-laki di dalam kapasitas dan di dalam melaksanakan mandat budaya. Di dalam keluarga, Tuhan telah menetapkan peraturan bagi suami tentang bagaimana memperlakukan istri dengan mengagungkan Tuhan. Perempuan ditempatkan di bawah kepemimpinan laki-laki dengan maksud untuk dikasihi, dilindungi dan diperhatikan kesejahteraannya bahkan suami harus rela berkorban untuk istrinya (Gunawan, 2016).

Begitu banyak ayat dan hadist dalam agama Islam yang diselewengkan menjadi sebuah justifikasi bahwa Islam adalah agama yang mendiskreditkan gender. Hadist tersebut selalu menjadi kajian yang kerap dikomentari oleh para orientalis dan feminis. Untuk itu perlu selektif dalam melihat pada siapa yang menafsir dalil terutama tentang

gender. Ada beberapa syarat ketat dalam menjadi seorang ahli tafsir, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat Keilmuan yang mendalam baik tentang Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dan dibekali pengetahuan mengenai penafsiran para sahabat nabi
- b. Memahami dan menguasai dengan sangat baik bidang bahasa, terutama bahasa arab seperti nahwu, sharaf, balaghah dan lainnya.
- c. Syarat 'aqliyyah memiliki akal baik, mampu melakukan tarjih terhadap dalil yang kontradiksi.
- d. Syarat diniyyah dan adabiyyah, harus memiliki akidah yang lurus, menunaikan semua kewajiban beragama, konsisten, jujur, teliti dalam menukil, lantang menyampaikan haq dan melawan kebatilan

Maka dari itu, jelas dari syarat diatas tidak ada indikasi bahwa seorang ahli tafsir harus lah laki-laki. Oleh karenanya tidak ada diskriminasi sebagaimana yang dituduhkan oleh kalangan feminis selama ini (Apandi, 2015).

Kaum feminis mendeskripsikan bahwa Islam menyebabkan dikotomi gender. Seolah wanita adalah sebagai second public. Hakikatnya agalam Islam telah mengangkat posisi par wanita menuju lebih tinggi, memberikan bentuk kebebasan, kehormatan dan hak-hak personal secara merdeka, sesuai dengan fitrah wanita itu sendiri. Di tanah arab sendiri, Islam lah yang mengakhiri bentuk perbudakan, dan memberikan hak memilih akidah, pernikahan, dan aspek kehidupan lainnya. Bahkan hak kebebasan untuk memiliki harta benda seperti contoh warisan, transaksi jual beli, hibah, dan lainnya. Satu-satunya pembeda antara wanita dan pria di hadapan Allah subhanahuwata'ala adalah amal soleh dan ketakwaannya kepada sang khalik (Is, 2018).

Di sisi lain, ada beberapa pemahaman bahwa agama lah yang pertama kali melahirkan konsep feminisme seperti apa yang telah diargumentasikan oleh Jalaludin Rahmat. Islam sangat memuliakan perempuan, orang Islam harus berjuang memuliakan mereka, bila keadaan perempuan saat ini belum mulia maka kaum muslim wajib mengubah masyarakat sehingga posisi mereka menjadi mulia. Jadi sampai disini orang Islam boleh dikatakan Feminis (Rahmat, 1997)

Kutipan di atas meskipun pada awalnya cukup menarik, namun pada kata terakhir justru menganggap orang Islam adalah feminis merupakan pernyataan yang ambigu, karena kita tau bahwa begitu banyak penelitian dibuat dalam rangka menentang beredarnya gerakan feminis dan afiliasinya terhadap beberapa LSM sebagai kendaraan untuk menyebarkan paham tersebut. Konsep gender dan feminisme merupakan persoalan barat. Sudah sepatutnya kita tidak perlu mengadopsi konsep tersebut ke ranah agama Islam. sebab meskipun sama-sama menggabungkan hak-hak wanita, namun feminisme dan gender tidak akan bertaut dengan ranah agama, sebab feminisme lahir dari filsafat barat yang mengedepankan kebebasan serta hak azazi manusia dan lain - lainnya. Meskipun tidak sedikit juga tokoh intelektual yang mencoba meramu

keduanya, konsep gender dan konsep agama yang melahirkan filsafat Islam dan sederet tokoh tokonya di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep kesetaraan mestinya tidak mengacu pada persamaan, atau identik. “Berbeda tapi setara” adalah cara terbaik dalam memahami kedudukan pria dan wanita. Jika dipahami dengan baik, maka yang muncul adalah saling melengkapi sesuai kodratnya masing-masing seperti apa yang telah diajarkan dalam literatur teologis. Selanjutnya ide untuk menyatukan agama dan kesetaraan gender/ feminisme juga tidak tepat. Karena memiliki basis ideologi yang berbeda. Begitupula halnya dengan media massa. Media massa disimpulkan sebagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami secara *Taken for granted* oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Meskipun bukan satu-satunya, namun media massa memegang faktor yang cukup berpengaruh, hal ini didasari oleh orientasi media massa yang telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena cukup besarnya intensitas masyarakat mengkonsumsinya.

Hal ini dapat dilihat melalui kepemilikan modal dan produksi media yang selalu berorientasi pada pasar. Bukan saja yang berorientasi pada faktor ekonomi namun juga telah menyentuh ranah ideologi, politik, dan kekuasaan yang akhirnya berujung pada penaklukan akan publik. Sebagai sarana konsumsi khalayak, pelaku media massa harus terus memberikan pemberitaan yang proporsional agar citra perempuan tetap baik sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan stereotip negatif terhadap kaum perempuan tidak lagi dijadikan tunggangan atau alat untuk melakukan propaganda kepada publik.

Selain mendistorsi ajaran agama dengan merusak akarnya, Gerakan feminis yang juga bagian dari global konsep juga menciptakan pasar konsumtif para wanita. Jika kita analisis dari trend budaya baru, atau yang sering disebut dengan istilah *pop culture*, maka gerakan usaha dominasi dan kebebasan ini mengarah pada perilaku konsumtif wanita kelas menengah keatas seperti penggunaan kosmetik atau produk kecantikan, fashion, majalah majalah wanita dan lain-lain dalam rangka mengakomodir kebutuhan perempuan (Novarisa, 2017).

#### 5. REFERENSI

Agustina, M., Miko, A., Asmawi. (2020) Peranan Komunikasi Interpersonal Dalam Memanajemen Konflik Pasangan Suami Dan Istri Yang Sama-Sama Bekerja. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 4(1), 158-166

Al-Banna, Hasan (2003). *Majmuc ah rasa'il*. Kaherah: Darul Salam

- Aminah, S. (2012). Gender, Politik, Dan Patriarki Kapitalisme dalam Perspektif Feminis Sosialis. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2), 1-5.
- Apandi, T. (2015). Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 1-22.
- Badan Pusat Statistik, (2018) *Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2018*, diakses pada tanggal 16/08/2020. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/03/20/1288/persentase-penduduk-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2009-2013.html>
- Bakhtiar, R. M., Sjaifirah, N. A., & Herawati, M. (2019). Sensitivitas gender media online Detik. com. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 77-94.
- Danardono, D., Purwoko, J., & Hadiyono, V. (2014) Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat atas Kesetaraan Gender. Retrieved from <http://jurnalperempuan.org>
- Dewi, M. A. (2014). Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3).
- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(3), 284-300.
- Faizain, K. (2007). Mengintip Feminisme Dan Gerakan Perempuan. *EGALITA*. 2(1)
- Fakih, M. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faludi, S. (2009). *Backlash: The undeclared war against American women*. Broadway Books.
- Gamson, W, Meyer, D. (2004) "Framing Political Opportunity" dalam Doug McAdam, John D. Mc Carthy, Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gillis, S., Howie, G., & Munford, R. (Eds.). (2004). *Third wave feminism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gunawan, L. (2016). Kesetaraan dan Perbedaan Laki-laki dan Perempuan: Kritik terhadap Gerakan Feminisme. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(2), 288.
- Hendariningrum, R. (2005). *Isu Gender di Mata Wartawan*. Disertasi. UPN" Veteran" Yogyakarta
- Hooks, Bell. 2000. *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press.
- Humm, Maggie. 2007. *Dictionary of Feminist Theories*, dalam Mundi Rahayu (Penj.). Jogjakarta: Fajar Pustaka

- Is, F. (2018). Wanita Mayoritas di Neraka, Imperfek Akal dan Agama: Antara Polemik, Solusi dan Motivasi. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 53-80.
- Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan feminisme dalam studi hukum Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 139-158.
- Jackson, R & Sorensen, G. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional, Terj. D. Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jacobs, J. M., & Nash, C. (2003). Too little, too much: cultural feminist geographies. *Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography*, 10(3), 265-279.
- Juditha, C. (2015). Gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 1(1).
- Kania, D. D. (2010). Isu Gender; Sejarah dan Perkembangannya. *Jurnal Islamia*, 3(5).
- Khuza'i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102-118.
- Megawangi, Ratna. (2001). Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.
- Mernissi, F., & Hassan, R. (1996). *Setara di hadapan Allah*. LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, E. Edition. (2003). *Springfield, MA: Merriam-Webster*.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 490-511.
- Mutmainnah, (2018). *Dampak Gerakan Feminisme dalam Perspektif Islam Kontemporer*. (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Novarisa, G. (2017) Representasi dan Stereotype Kelompok Hijabers Sebagai Bagian dari Pop Culture. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 1 (1), 11-20.
- Nugroho, C. (2018). Relasi kuasa media dan isu gender dalam program televisi di Indonesia. *ProTVF*, 2(2), 111-126.
- Pathak, V., Jena, B., & Kalra, S. (2013). Qualitative research. *Perspectives in clinical research*, 4(3)
- Rakhmat, J. (1997). *Catatan Kang Jalal: Visi media, politik, dan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Ruoho, I., & Torkkola, S. (2018). Journalism and gender: Toward a multidimensional approach. *Nordicom Review*, 39(1), 67-79.

- Salleh, N. M. (2016). Peranan NGO Islam dalam Menangani Agenda Feminisme di Malaysia. *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 1(1), 96-112.
- Santoso, W. M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), 411-426
- Shofan, Moh. (2006). Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Tarrow, S. (1994). *Power in movement: Collective action, social movements and politics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ân*. Jakarta: Penerbit PARAMADINA, Cet. II.
- Umar, T. M. (2005). Propaganda Feminisme dan perubahan sosial. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 205-214.
- Valentina, A. H. (2004). Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme. Jakarta: debtWACH Indonesia.
- Witarti, D. I. (2011). Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(2), 1-15